

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

6.1.1 Pola Hubungan Otoritarian

Berdasarkan hasil analisis pada Pola Hubungan Otoritarian dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan sebuah keputusan atau kebijakan itu yang menentukan adalah pemerintah tertinggi saja, para mosalaki tidak dilibatkan hanya disaat membahas apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah tertinggi. Di desa Lajawajo sudah terbukti bahwa yang menentukan atau menetapkan keputusan tersebut hanya pemerintah tertinggi, para mosalaki dan masyarakat dihadirkan pada saat membahas program kerja yang telah ditentukan oleh kepala desa. Hal ini yang lebih berdominan di tingkat desa yaitu kepala desa. Implementasi yang dibuat oleh pemerintah tertinggi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Partisipasi dari masyarakat sangat minim karena hubungna kepala desa dengan masyarakat kurang bagus. Mungkin juga kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kesejahteraan masyarakat juga yang datangnya dari masyarakat sendiri dimana masyarakat bergotong royong dan berpartisipasi dalam suatu pembangunan. Bekerja sama dari pihak-

pihak masyarakat dan elit akan sangat dibutuhkan sehingga membawa begitu banyak perubahan-perubahan.

6.1.2 Pola Hubungan Transisional

Berdasarkan hasil analisis tentang pola hubungan transisional dapat kita ketahui bagaimana cara pemerintah untuk mendekati masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Di desa Lajawajo Kepala Desa melakukan dengan cara memberi ruang kepada masyarakat untuk berpendapat, dengan cara komunikasi agar masyarakat juga peka terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa juga melakukan pertemuan-pertemuan khusus dengan para mosalaki ola. Untuk memperkuat kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat dengan cara duduk bersama atau minta pendapat/ide-ide dari para mosalaki ola. Kepala desa juga jangan membuat keegohan tersendiri sehingga membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam program-program desa. Tetapi yang dialami di desa Lajawajo kepala desa selalu mendengarkan masyarakat dan memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat dan memberikan masukan atau usul saran. Dan bahwa pemerintah sangat membutuhkan elit tradisional setiap adanya suatu pembangunan dalam mengerakkan masyarakat karena yang lebih dekat dengan masyarakat adalah mosalaki ola dan untuk memotivasi mereka dalam setiap aktifitasnya.

6.1.3 Pola Hubungan Demokratis

Berdasarkan hasil analisis tentang pola hubungan demokratis dapat disimpulkan bahwa peran ketua adat dalam menyatukan masyarakat adalah dalam berbagai hal upacara adat seperti membangun rumah adat, perkawinan dan juga

kematian. Dalam upacara adat apapun para mosalaki tidak sendiri bekerja melainkan mengumpulkan semua warga masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi. Sehingga hubungan pemerintah dengan mosalaki selalu berjalan. Dalam hal ini pemerintah dengan mosalaki saling membutuhkan dalam pelaksanaan apa saja baik dalam penyelesaian masalah, pembangunan desa serta upacara-upacara adat lainnya.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan bahwa Kepala Desa lebih berdominan dalam menentukan kebijakan dan tidak melibatkan para Elit/Mosalaki yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, maka penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Pemerintah Desa Lajawajo dalam pelaksanaan pembangunan desa harus selalu merencanakan dan melibatkan para Elit Tradisional/Mosalaki Ola yang ada demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Desa Lajawajo harus selalu melibatkan para Mosalaki dan masyarakat dalam menentukan kebijakan.
3. Harus selalu adanya membangun hubungan antara Pemerintah, Elit Tradisional dan masyarakat.
4. Masyarakat Desa Lajawajo perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
5. Diharapkan perhatian dari pemerintah Desa Lajawajo untuk tetap menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya tradisional

(Sese), khususnya di Desa Lajawajo agar tidak hilang atau punah akibat perkembangan jaman.

6. Disaran kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai keterlibatan Mosalaki dalam pembangunan desa selain relasi kuasa pemerintah desa dengan mosalaki dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Lajawajo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm.130

Roderick Martin, Sosiologi Kekuasaan (Jakarta: Rajawali Press, 1995) hlm. 98

Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 81.

Sp Varma, Teori Politik Modern , Jakarta:Rajawali Pers. 2010., hlm.200

Heather Sutherland. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi.(Jakarta ; Sinar Harapan 1983).hal. 25.

Heather Sutherland. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi.(Jakarta ; Sinar Harapan 1983).hal 25.

Sartono Kartodirji, Elit Dalam Perspektif Sejarah.(LP3ES ; Jakarta 1981). hlm. 114.

Maurice Deverger ,Sosiologi Politik.(Jakarta: Rajawali Press) hal.178.

Robert Van Niel, Munculnya Elit Modern Indonesia.(Jakarta: Pustaka Jaya 1983). Hlm 30

Keller, Suzanne. 1995. Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Miftha Thoha, Perilaku Organisasi, Pengertian Pemimpin, Jakarta, Cv Rajawali, 1983, hal:255

Moch Nurhasim dkk, Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P)LIPI,2003), hal 13.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 1992, hlm.58.

Charles F. Andrain, Keidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, hlm. 130

Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 1995, hal.29

Adri, Patton, Pemimpin Informal, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah, Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, 2005, hal.23

Muji Sutrisno, Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 150.

Jurnal

Mukhamad Fathoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

Dalam Pembangunan Fisik Desa Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 139-146.

Tesis. Khairul Amin, 2017, Elit dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa Study Relasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Desa di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe,.Aceh

Terfena Adolfina Lenggu, 2001, Peranan Elit Tradisional Sebagai Pendukung Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Wederok Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Belu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Vilfredo Pareto dalam bukunya "The Mind and Society" dikutip dari Bottomore, Tom B. Elite and Society, New York: Penguin Books Ltd., 1982, hlm 7.

Eko, Sutoro, dkk, Desa Baru, Negara Lama, dalam Frans Tokan, dkk, Laporan Penelitian: Analisis Relasi Kuasa BPD, Kepala Desa, Elit Tradisional di Desa Wetoone Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur, 2018, hlm 18
Shuida, I Nyoman, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa, dalam Frans Tokan, dkk, Laporan Penelitian: Analisis Relasi Kuasa BPD, Kepala Desa, Elit Tradisional di Desa Wetoone Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur, 2018, hlm 18

Mudhoffi, Abdil Mughis dalam Frans Tokan, dkk Laporan Hasil Penelitian: Analisis Relasi Kuasa BPD, Kepala Desa, Elit Tradisional di Desa Wetoone Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur, 2018, hlm 19.

Haryanto, Venan dalam Frans Tokan Laporan Hasil Penelitian: Analisis Relasi Kuasa BPD, Kepala Desa, Elit Tradisional di Desa Wetoone Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur, 2018, hlm 20.

Siagian, P.S (1991). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta Rineka Cipta
Sudirwo, D. (1985) Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Aksara

Sumber Lain

UU No.6 Thn 2014 Tentang Desa